



Otonomi Sekolah dan Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Sri Mirnawati^{1*}, Milawati², Hairullah³, Aslamiah⁴, Celia Cinantya⁵

¹Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, srimirnawati75@gmail.com

²Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, milawatispd246@gmail.com

³Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, hairullah.bakrie87@gmail.com

⁴Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, aslamiah@ulm.ac.id

⁵Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, celia.cinantya@ulm.ac.id

*Corresponding Author: srimirnawati75@gmail.com

Abstract: This research is motivated by the low quality of education in various schools, primarily due to resource inequality, weak managerial capacity, and minimal community participation. School autonomy is seen as a strategy for improving educational quality by granting schools the authority to independently manage resources, programs, and policies. This study aims to explore the implementation of school autonomy in school-based quality improvement, identify supporting and inhibiting factors, and provide policy recommendations that are adaptive to the local context. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies with principals, teachers, school committee members, supervisors, and parents. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results show that the implementation of school autonomy has a positive impact on quality improvement through more targeted budget management, program development according to needs, and increased community participation when school committees are actively involved. However, the effectiveness of autonomy is highly dependent on the leadership capacity of school principals, the administrative system, and existing monitoring mechanisms. Challenges that arise include increasing administrative burdens, limited formal committee participation, and weak quality indicators. To achieve this, managerial training for principals and teachers, strengthening the role of committees, and implementing a comprehensive quality evaluation system are essential. A policy of equal distribution of resources is also crucial to prevent disparities between schools.

Keywords: School Autonomy, Quality Improvement, Community Participation, School Leadership, School-Based Management

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya mutu pendidikan di berbagai sekolah, khususnya yang disebabkan oleh ketimpangan sumber daya, lemahnya kapasitas manajerial, serta minimnya partisipasi masyarakat. Otonomi sekolah dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya, program, dan kebijakan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi otonomi sekolah dalam peningkatan mutu berbasis sekolah,

mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, dan orang tua. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi sekolah memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu melalui pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, pengembangan program sesuai kebutuhan, serta peningkatan partisipasi masyarakat saat komite sekolah dilibatkan secara aktif. Namun, efektivitas otonomi sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, sistem administrasi, dan mekanisme monitoring yang ada. Tantangan yang muncul meliputi beban administrasi yang meningkat, partisipasi komite yang masih bersifat formal, serta lemahnya indikator mutu. Maka, diperlukan pelatihan manajerial bagi kepala sekolah dan guru, penguatan peran komite, serta sistem evaluasi mutu yang komprehensif. Kebijakan pemerataan sumber daya juga penting untuk mencegah kesenjangan antar sekolah.

Kata Kunci: Otonomi Sekolah, Peningkatan Mutu, Partisipasi Masyarakat, Kepemimpinan Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan ketidakmerataan mutu antar sekolah dan antar daerah, di mana sekolah di wilayah terpencil sering kekurangan sumber daya baik secara sarana, prasarana, maupun tenaga pendidik yang kompeten. Kamaruddin *et al.*, (2024) menambahkan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan, seperti keterbatasan pelatihan, kurangnya akses terhadap teknologi, dan rendahnya kompetensi pedagogik, masih menjadi hambatan dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan tersebut dengan memberi kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam pengambilan keputusan pengelolaan pendidikan. Menurut Maulana *et al.*, (2023) Otonomi dan desentralisasi pendidikan tidak hanya sekedar berpaku pada anggaran atau keuangan. Akan tetapi, lebih melakukan kegiatan terkait reformasi pendidikan secara menyeluruh. Lestari & Effane (2023) menambahkan bahwa desentralisasi dalam bidang pendidikan berperan untuk meningkatkan kreativitas guru dan staff sehingga mampu memberikan pengalaman terhadap pelatihan dalam mengambil keputusan.

Namun dalam praktiknya, banyak sekolah belum mampu memanfaatkan otonomi tersebut secara optimal karena keterbatasan kapasitas administratif, kurangnya pelatihan, dan dukungan teknis yang lemah. Priyadi (2024) menambahkan bahwa banyak kepala sekolah dan guru masih kurang memahami konsep otonomi sekolah dan bagaimana mengintegrasinya kedalam praktik pendidikan sehari-hari. Selain itu, mutu pendidikan sering masih rendah diukur dari hasil ujian nasional, akreditasi, dan standar kelulusan, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu belum berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Padahal sekolah yang memiliki prestasi tinggi adalah sekolah yang mampu meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didiknya sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat (Aslamiah, Cinantya, Rafanti, *et al.*, 2023; Suriansyah *et al.*, 2021). Situasi ini memunculkan kebutuhan akan model pengelolaan mutu pendidikan yang berbasis sekolah dan memanfaatkan otonomi sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah secara nyata. Namun, implementasi otonomi sekolah juga memerlukan kepemimpinan yang kuat dan visioner dari kepala sekolah (Ismanto *et al.*, 2022).

Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara otonomi pendidikan atau manajemen berbasis sekolah dengan peningkatan mutu pendidikan. Misalnya penelitian

Parastu, Dinata, Tyastuti, Yantoro, & Setiyadi (2023) yang menemukan bahwa otonomi pendidikan di SDN 55/I Sridadi berkontribusi terhadap peningkatan mutu sekolah melalui pengelolaan sarana prasarana dan pengawasan kinerja tenaga pendidik. Penelitian lain di Daerah Lombok Timur menunjukkan bahwa manajemen berbasis sekolah berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan terbukti berdampak langsung pada peningkatan hasil belajar siswa, kedisiplinan guru, dan kepuasan orang tua terhadap layanan pendidikan (Wati, Fahmu & Utama, 2025). Penelitian pada SMA Unismuh Makassar juga menemukan bahwa penggunaan otonomi pendidikan mendukung akreditasi A melalui persiapan sarana, prasarana dan kinerja guru serta staf kependidikan (Ayu, 2017).

Walaupun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat ruang untuk mengeksplorasi variabel-variabel baru yang belum banyak diteliti, seperti pengaruh dari partisipasi masyarakat, budaya lokal, dan kepemimpinan kolaboratif dalam konteks otonomi sekolah. Penelitian juga perlu memperhatikan bagaimana otonomi sekolah diterapkan di sekolah dengan karakteristik berbeda misalnya sekolah di sekolah swasta dan negeri karena konteks lokal dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Selain itu, aspek evaluasi dan keberlanjutan program mutu berbasis sekolah masih kurang mendapat perhatian, khususnya bagaimana sekolah mempertahankan mutu setelah dukungan eksternal seperti program penggerak atau dana tambahan dihentikan. Dengan demikian, penelitian baru perlu menawarkan model implementasi yang adaptif terhadap kondisi lokal dan mampu menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam otonomi sekolah.

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada sekolah-dasar hingga menengah, dan kurang membahas jenjang yang lebih tinggi atau tingkat variasi sekolah yang sangat ekstrem dari segi sumber daya. Penelitian sering hanya mengukur output berupa prestasi akademik atau hasil ujian saja, sementara aspek mutu non-akademik seperti karakter, kreativitas, partisipasi siswa, dan kepuasan stakeholder kurang diperhatikan. Banyak studi yang menggunakan pendekatan *cross sectional*, sehingga sulit untuk mengetahui dinamika perubahan mutu dari waktu ke waktu atau setelah intervensi tertentu. Selain itu, variasi dalam implementasi otonomi belum dieksplorasi secara mendalam, misalnya bagaimana kebijakan pusat, pemerintah daerah dan kepemimpinan sekolah sinergi dalam pelaksanaan otonomi. Keterbatasan data juga menjadi masalah yang dimana beberapa penelitian mengandalkan data sekolah formal saja tanpa melibatkan perspektif guru, siswa, masyarakat secara langsung.

Penelitian baru perlu mengkaji otonomi sekolah dalam konteks lokal spesifik misalnya daerah terpencil, daerah dengan budaya lokal kuat, atau sekolah dengan infrastruktur kurang memadai, sehingga model yang dihasilkan lebih kontekstual dan aplikatif. Penelitian juga bisa fokus pada sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak atau sekolah yang baru mendapatkan akreditasi rendah, untuk melihat perubahan dari kondisi awal ke kondisi lebih baik. Meneliti praktik kepemimpinan sekolah dalam memanfaatkan otonomi, khususnya kepemimpinan yang partisipatif dan berbasis kolaborasi dengan komite sekolah dan masyarakat, diharapkan dapat menghadirkan kebaruan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana otonomi sekolah dapat diimplementasikan untuk peningkatan mutu berbasis sekolah di sekolah dengan karakteristik spesifik, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi efektivitasnya dari berbagai dimensi mutu. Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan model implementasi otonomi sekolah yang adaptif terhadap konteks lokal dan berkelanjutan. Kontribusi penelitian diharapkan berupa rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah dan sekolah agar otonomi dapat dioptimalkan dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Selain itu, penelitian ini akan melengkapi kekurangan literatur sebelumnya terutama pada aspek non-akademik, kepemimpinan, dan keberlanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam pelaksanaan otonomi sekolah dalam peningkatan mutu berbasis sekolah. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang persepsi, sikap, dan pengalaman para pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan orang tua, terkait dengan konsep otonomi sekolah dan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam konteks Pendidikan (Suryabrata, 1998). Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pengawas sekolah yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami konteks dan permasalahan yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen sekolah seperti rencana kerja dan laporan mutu. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi otonomi sekolah, faktor pendukung dan penghambatnya, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan (Creswell, 2018; Sugiyono, 2017; Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan beragam pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan otonomi sekolah. Melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, dan orang tua, muncul sejumlah temuan penting yang mencerminkan peluang serta tantangan dalam penerapan otonomi di tingkat satuan pendidikan. Berikut rangkuman pernyataan dari masing-masing responden:

Tabel 1. Ringkasan Pandangan Pemangku Kepentingan terhadap Pelaksanaan Otonomi Sekolah

No	Responden	Pernyataan	Makna Utama/ Temuan
1	Kepala Sekolah	“Dengan otonomi, kami bisa menganggarkan perbaikan laboratorium dan program ekstrakurikuler sesuai kebutuhan sekolah; namun kepala sekolah butuh pelatihan manajemen lebih lanjut.”	Otonomi memungkinkan pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan, tetapi diperlukan peningkatan kapasitas manajerial.
2	Guru	“Otonomi memberi kebebasan memilih metode pembelajaran, tetapi administrasi dan pencatatan membuat waktu mengajar berkurang.”	Otonomi mendukung inovasi pembelajaran, namun beban administrasi mengurangi waktu mengajar.
3	Ketua Komite Sekolah	“Saat komite dilibatkan secara nyata bukan formalitas dukungan dana dan advokasi untuk sekolah meningkat.”	Partisipasi aktif komite sekolah meningkatkan dukungan finansial dan advokasi.
4	Pengawas/ Penguji Mutu	“Beberapa sekolah memanfaatkan otonomi untuk inovasi, tetapi ada sekolah yang kebingungan karena kapasitas manajerial rendah.”	Efektivitas otonomi sangat bergantung pada kapasitas manajerial sekolah.
5	Orang Tua	“Kami senang diajak musyawarah; namun belum semua sekolah rutin mengadakan pertemuan yang bermakna.”	Orang tua menghargai partisipasi, namun mekanisme pertemuan rutin belum merata di semua sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan wewenang otonomi di tingkat sekolah terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengaturan program berkorelasi dengan perbaikan fasilitas dan iklim sekolah yang lebih kondusif untuk pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa ketika sekolah diberi otoritas operasional yang jelas, hal itu dapat meningkatkan aspek-aspek iklim sekolah seperti fokus akademik dan keterlibatan komunitas (Khanal & Guha, 2023). Namun, perbaikan nyata bergantung pada kompetensi pengelola sekolah tanpa kapasitas manajerial yang memadai, otonomi hanya menjadi kebebasan tanpa arah (Fuad *et al.*, 2022). Dalam konteks lapangan kami, kepala sekolah yang aktif merencanakan dan mengikuti pertemuan guru serta komite tampak lebih sukses memanfaatkan otonomi untuk perbaikan. Oleh karena itu, pemberian wewenang harus diiringi program peningkatan kapasitas agar transformasi menjadi peningkatan mutu yang berkelanjutan (Khanal & Guha, 2023; Fuad *et al.*, 2022).

Peran partisipasi Masyarakat melalui komite sekolah dan pertemuan terstruktur terbukti memperkuat akuntabilitas dan pemilihan prioritas sekolah, sehingga berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sampaleng & Baharuddin *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat otonomi sekolah perlu ditingkatkan untuk memperoleh dukungan yang lebih besar dari komunitas pendidikan secara keseluruhan. Temuan lapangan kami mendukung kesimpulan tersebut bahwa sekolah yang membangun mekanisme partisipatif mengalami peningkatan dukungan nyata dari orangtua dan komunitas (Nashar *et al.*, 2025). Partisipasi tersebut juga memperkuat legitimasi keputusan sekolah sehingga kebijakan lokal lebih sesuai kebutuhan komunitas. Dengan demikian, otonomi sekolah yang disertai mekanisme partisipasi formal memberi peluang nyata untuk peningkatan mutu berbasis sekolah (Sihombing, Gultom & Situmorang, 2022).

Kapasitas kepemimpinan kepala sekolah muncul sebagai faktor penentu dalam mengubah otonomi menjadi mutu pendidikan yang lebih baik, kepala sekolah yang mempraktikkan kepemimpinan instruksional dan kolaboratif mampu mengarahkan guru dan sumber daya ke peningkatan proses pembelajaran. Dengan demikian, kepala sekolah tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga mentor, mediator, dan pembina bagi seluruh komunitas sekolah (Gaol *et al.*, 2017). Di lapangan, kelemahan yang sering ditemui adalah kepala sekolah yang promosi dari guru tanpa persiapan manajerial memadai kondisi ini membatasi efektivitas otonomi (Fuad *et al.*, 2022; Widodo, 2024). Hal ini didukung oleh Darojat *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan kepemimpinan di kalangan kepala sekolah dan staf pengajar. Oleh karena itu kebijakan otonomi perlu disertai program pelatihan kepemimpinan yang spesifik untuk kepala sekolah agar dapat mengintegrasikan manajemen, pengawasan mutu, dan pembelajaran. Kepemimpinan yang inklusif dan suportif akan memperkuat budaya sekolah yang berorientasi pada mutu (Alfayed, Suriansyah & Purwanti, 2025).

Temuan lain menunjukkan risiko bahwa otonomi yang tidak diimbangi pemerataan sumber daya dan sistem akuntabilitas dapat memperlebar ketimpangan mutu antar sekolah (Yusuf & Hanif, 2025). Kajian lintas-negara menunjukkan bahwa efek otonomi terhadap ketimpangan capaian bergantung kuat pada konteks negara dan kebijakan pelengkap dalam beberapa konteks, otonomi dapat memperkuat perbedaan prestasi antar kelompok sosioekonomi (Hossain, 2023). Di konteks Indonesia, masalah regulasi, distribusi dana, dan kapasitas lokal yang tidak merata turut menimbulkan variasi hasil yang signifikan beberapa sekolah maju pesat sementara yang lain stagnan (Widodo, 2024; Fuad *et al.*, 2022). Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus memperhatikan mekanisme kompensasi bagi sekolah-sekolah yang rentan. Tanpa langkah-langkah tersebut, otonomi berisiko menjadi beban bagi sekolah lemah dan keuntungan bagi sekolah yang sudah kuat (Mansyur, 2023).

Dari segi pelaksanaan, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang sering menghambat efektivitas otonomi sekolah. Kendala tersebut meliputi meningkatnya tugas administrasi, kurangnya keterlibatan aktif dari komite sekolah, serta lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi mutu (Hasanah & Syah, 2025). Guru menyampaikan bahwa tugas di luar mengajar menjadi lebih banyak ketika tidak ada staf administrasi yang cukup. Akibatnya, waktu untuk mengajar berkurang. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pembagian ulang tugas atau penambahan staf pendukung. Selain itu, jika tidak ada indikator mutu yang jelas di tingkat sekolah, maka usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan akan sulit dipantau secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu ada sistem administrasi sekolah yang kuat, pedoman akuntabilitas yang jelas, serta indikator mutu yang lengkap sebagai bagian penting dari pelaksanaan otonomi sekolah (Hanafiah *et al.*, 2025).

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat otonomi sekolah. Pertama, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru perlu menjadi syarat utama agar mereka mampu mengelola sekolah secara mandiri (Suherman *et al.*, 2023). Kedua, perlu mekanisme partisipasi komunitas yang jelas sehingga komite sekolah terlibat secara aktif, bukan sekadar formalitas (Ekawati, Haryati & Wuryandini, 2024). Ketiga, sistem monitoring mutu harus mencakup proses pembelajaran, budaya sekolah, dan hasil belajar secara menyeluruh (Sofiah & Pratama, 2024). Kombinasi antara instrumen kelembagaan dan dukungan teknis terbukti efektif dalam beberapa studi di Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerataan seperti kompensasi bagi sekolah tertinggal penting untuk mencegah kesenjangan (Hossain, 2023; Widodo, 2024). Evaluasi jangka panjang dengan metode campuran juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan peningkatan mutu (Miles *et al.*, 2014; Creswell, 2018).

KESIMPULAN

Otonomi sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis sekolah. Pemberian kewenangan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya, menentukan kebijakan, dan mengatur program sesuai kebutuhan terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Keberhasilan penerapan otonomi sangat bergantung pada kapasitas kepala sekolah dalam memimpin, kemampuan guru dalam berinovasi, serta partisipasi aktif masyarakat melalui komite sekolah. Sekolah yang memiliki kepemimpinan kuat dan melibatkan masyarakat secara nyata cenderung lebih berhasil mencapai peningkatan mutu secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala berupa perbedaan kemampuan antar sekolah, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya sistem akuntabilitas, sehingga diperlukan pemerataan dukungan, pelatihan, serta evaluasi berkelanjutan agar otonomi sekolah benar-benar mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

REFERENSI

- Ayu, S. (2017). *Pengaruh Otonomi Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu SMA UNISMUH Makassar* (Doctoral dissertation, Muhammadiyah University Makassar).
- Alfayed, D., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2025). PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI DALAM KELAS HETEROGEN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMAS ITP TARJUN. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 633-640. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.602>
- Aslamiah, A., Cinantya, C., Rafianti, W. R., Ngadimun, N., Amelia, R., Sari, L. A., & Aulia, N. (2023). Superior educational institution model in elementary school: The case study of education in Banjar District, Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(10).

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darojat, A. Z., Kulsum, U., & Iqbal, R. (2022). IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU BERBASIS MADRASAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH AL KHOIRIYAH KOTA BANDAR LAMPUNG. *UNISAN JURNAL*, 1(1), 432-440.
- Ekawati, H., Haryati, T., & Wuryandini, E. (2024). Peran Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(4), 278-289. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v4i4.4179>
- Fuad, N., Yusuf, C. F., & Aulia, R. N. (2022). School autonomy policy implementation in emerging country. *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)*, 14(1), 210–224. <https://doi.org/10.9756/INT-JECSE/V14I1.221026>
- Gaol, N. T. L. (2017). Teori dan implementasi gaya kepemimpinan kepala sekolah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 213-219. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p213-219>
- Hanafiah, R., Iffat, S., Nabila, L. R., & Kusumaningrum, H. (2025). Manajemen Berbasis Sekolah Meningkatkan Otonomi dan Akuntabilitas. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 4(1), 129-137. <https://doi.org/10.58192/insdun.v4i1.2861>
- Hasanah, N., & Syah, E. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 769-787. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2333>
- Hossain, M. (2023). The linkage between school autonomy and inequality in achievement in 69 countries: Does development level matter? *The Journal of Development Studies*, 59(10), 1491–1507. <https://doi.org/10.1080/00220388.2023.2232916>
- Ismanto, H., Murtafiah, N. H., & Lestari, S. (2022). Implementasi Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di Sma Negeri 1 Bakauheni Lampung Selatan. *Unisan Jurnal*, 1(1), 491-501.
- Kamaruddin, I., Sari, M. N., Abdurrahman, A., Istiqomah, I., Herman, H., & Andriani, N. (2024). Evaluasi kinerja guru: Model dan metode dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Journal on Education*, 6(2), 11349-11358.
- Khanal, S., & Guha, P. (2023). Exploring the relationship between school-based management and school climate using PISA data. *Asia Pacific Education Review*, 24(4), 617–631. <https://doi.org/10.1007/s12564-023-09846-0>
- Lestari, W. D., & Effane, A. (2023). Desentralisasi Manajemen Sarana Prasarana. *Karimah Tauhid*, 2(1), 157-159. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7713>
- Mansyur, M. M. (2023). Refleksi otonomi pendidikan: Tantangan dan peluang di era saat ini. *Risda: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 7(1).
- Maulana, I., Metriani, L. P., Syahira, F., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. (2023). Analisis Penerapan Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan di SDN 195/VI Pematang Kancil. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6528-6533. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2784>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nashar, A. F., Nabila, A., AS, K. L. F., Mahmudah, R. A., Suriansyah, A., & Aslamiah, A. (2025). PERAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN BERMUTU PADA SDN BENUA ANYAR 4 BANJARMASIN. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 6191-6198. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i8.9574>
- Parastu, R. A., Dinata, D. D., Tyastuti, D., Yantoro, Y., & Setiyadi, B. (2023). Pengaruh Otonomi Pendidikan terhadap Peningkatan Mutu di SDN 55/I Sridadi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8121-8125. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3038>

- Priyadi, Y. (2024). PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI SEKOLAH YANG BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM. *UNISAN JURNAL*, 3(2), 512-523.
- Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 635–674. <https://doi.org/10.1177/0013161X08321509>
- Sampaleng, D., & Baharuddin, B. (2023). Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 756-769. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953>
- Sihombing, D., Gultom, S., & Situmorang, B. (2022). MANAJEMEN SEKOLAH BERBASIS BUDAYA LOKAL: Strategi Meningkatkan Peran & Partisipasi Aktif Stakeholder Mewujudkan Sekolah Bermutu.
- Suherman, I., Fauziah, R. S. P., Adri, H. T., Sujana, D. H., Qalbi, R. S., Nurzaini, K., & Rahmawati, T. (2023). Pelatihan kepala sekolah dan guru dalam peningkatan kapasitas sekolah (School Capacity Building). *Educivilia: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 4(2), 125-133. <https://doi.org/10.30997/ejpm.v4i2.7353>
- Suriansyah, A., Agusta, A. R., & Setiawan, A. (2021). Model Blended learning ANTASARI untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah. *Journal of Economics Education and Entrepreneurship*, 2(2), 90-110. <https://doi.org/10.20527/jee.v2i2.4102>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofiah, M. A., & Pratama, A. R. (2024). Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Kerangka Komprehensif untuk Meningkatkan Kinerja Institusi dan Hasil Siswa. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(001 Des), 993-1006. <https://doi.org/10.58230/27454312.1385>
- Wati, N. W. K., Fahmi, M., & Utama, W. K. (2025). Pengaruh Menajemen Berbasis Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan di SDN 1 Bagik Payung Selatan. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 12(3), 215-223. <https://doi.org/10.69896/modeling.v12i3.2964>
- Widodo, S. A. (2024). Analysis of the implementation of education democracy in Indonesia (regulations, models, problems, and future prospects). *South African Journal of Education*, 44(2), Article 2324. <https://doi.org/10.15700/saje.v44n2a2324>
- Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 153-166. <https://doi.org/10.31004/mnhraz85>